
Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Publik

VIVI SUMANTRI GIRSANG

Administrasi Publik

Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik adalah salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas keputusan yang diambil, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik, serta mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Melalui telaah literatur dan studi kasus, artikel ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik. Proses yang partisipatif memungkinkan adanya masukan yang beragam dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan efektif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dapat mengurangi potensi konflik, memperkuat transparansi, serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Namun, meskipun memiliki berbagai manfaat, implementasi partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran politik masyarakat, keterbatasan akses terhadap informasi, ketidakpercayaan pada pemerintah, serta dominasi kelompok elit sering kali menjadi hambatan utama dalam memastikan partisipasi yang bermakna. Salah satu contoh konkret adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang meskipun memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masih menghadapi tantangan dalam hal inklusivitas dan representasi.

Hasil analisis ini menekankan pentingnya peningkatan akses informasi, pendidikan politik, serta mekanisme partisipasi yang lebih adil dan inklusif agar partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, perencanaan publik, pengambilan Keputusan, Kebijakan Publik

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Secara historis, konsep partisipasi masyarakat telah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan publik, partisipasi masyarakat tidak hanya dianggap sebagai hak warga negara, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, transparansi, akuntabilitas, serta legitimasi keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Pentingnya partisipasi masyarakat telah diakui secara luas dalam teori dan praktik tata kelola pemerintahan. Salah satu dasar pemikiran yang mendasari pentingnya partisipasi adalah bahwa kebijakan publik yang baik harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam tahap identifikasi masalah, penyusunan kebijakan, hingga evaluasi dan implementasi kebijakan tersebut. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan, dapat diterima, dan lebih mudah diimplementasikan, karena didukung oleh mereka yang berkepentingan langsung.

Dalam konteks Indonesia, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengamanatkan agar masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan publik, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik di Indonesia sering kali diwujudkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum tahunan yang diadakan di berbagai tingkatan pemerintahan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga nasional) yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk mendiskusikan dan menentukan prioritas pembangunan. Mekanisme ini diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk

menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya, serta berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan di tingkat lokal hingga nasional.

Namun, meskipun secara teoretis partisipasi masyarakat dalam Musrenbang maupun proses pengambilan keputusan lainnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan publik, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi aktif dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik, sehingga sering kali hanya sebagian kecil dari masyarakat yang benar-benar terlibat dalam forum-forum seperti Musrenbang. Rendahnya kesadaran politik dan minimnya akses informasi menjadi beberapa penyebab rendahnya tingkat partisipasi ini.

Selain itu, meskipun ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi, tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat. Kelompok-kelompok marjinal, seperti masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok minoritas, sering kali kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan semua lapisan masyarakat, melainkan lebih banyak mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok yang lebih dominan, seperti elit lokal atau kelompok yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan proses politik.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga sering kali terhambat oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan keterbukaan informasi, dalam praktiknya akses masyarakat terhadap informasi yang relevan sering kali terbatas. Banyak keputusan penting yang diambil secara tertutup atau tanpa konsultasi publik yang memadai. Hal ini tidak hanya mengurangi kualitas partisipasi masyarakat, tetapi juga memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan proses pengambilan keputusan itu sendiri.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi hambatan serius dalam meningkatkan partisipasi. Di banyak kasus, masyarakat enggan terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena mereka merasa bahwa suara mereka tidak akan didengar atau tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Situasi ini diperparah oleh adanya kecenderungan di beberapa daerah di mana partisipasi masyarakat hanya dijadikan formalitas, tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap kebijakan yang diambil.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih inklusif dan efektif. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pendidikan politik di kalangan masyarakat. Pendidikan politik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi publik yang relevan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan informasi yang memadai.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif, dengan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan dukungan khusus kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili, misalnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik adalah elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat tetap harus menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dan inklusif, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan, akuntabel, dan diterima oleh semua pihak.

Pembahasan

1. Pengertian dan Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan publik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara dalam berbagai tahap proses pengambilan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi simbol dari demokrasi, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik.

Menurut Arnstein (1969) dalam "Ladder of Citizen Participation", partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi berbagai tingkatan, mulai dari manipulasi (manipulation) hingga kontrol warga (citizen control). Idealnya, partisipasi masyarakat tidak hanya

terjadi pada tingkat konsultasi semata, tetapi mencapai tingkatan di mana masyarakat dapat memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan yang diambil.

Partisipasi yang efektif juga dikaitkan dengan kualitas kebijakan publik. Kebijakan yang dirumuskan dengan melibatkan masyarakat cenderung lebih efektif karena mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam implementasinya.

2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Publik

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Berikut beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang umum dilakukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik:

a. Musyawarah dan Konsultasi Publik: *Salah satu bentuk partisipasi yang paling umum adalah musyawarah atau konsultasi publik. Pemerintah dapat mengundang masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai rencana kebijakan tertentu. Musyawarah sering kali diadakan dalam bentuk pertemuan terbuka, diskusi kelompok fokus, atau survei.*

b. Referendum dan Pemungutan Suara: *Referendum adalah bentuk partisipasi masyarakat yang lebih formal dan langsung. Melalui referendum, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan suara mengenai isu-isu penting, seperti perubahan konstitusi atau kebijakan besar lainnya.*

c. Komite atau Kelompok Kerja Masyarakat: *Partisipasi masyarakat juga dapat diwujudkan melalui pembentukan komite atau kelompok kerja yang melibatkan perwakilan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok ini biasanya bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan.*

d. Protes dan Demonstrasi: *Partisipasi tidak selalu terjadi melalui jalur formal. Ketika masyarakat merasa bahwa kepentingan mereka tidak diperhatikan, demonstrasi atau protes dapat menjadi cara mereka untuk menyuarakan pendapat dan mempengaruhi kebijakan.*

3. **Dampak Positif Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Publik**

Partisipasi masyarakat yang efektif membawa banyak dampak positif terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Beberapa dampak tersebut antara lain:

a. Meningkatkan Kualitas Kebijakan: *Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mendapatkan informasi yang lebih kaya dan beragam mengenai masalah yang dihadapi. Hal ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*

b. Legitimasi Kebijakan: *Partisipasi masyarakat memberikan legitimasi kepada kebijakan yang diambil. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mereka lebih mungkin untuk menerima dan mendukung kebijakan tersebut.*

c. Mengurangi Konflik: *Dengan melibatkan berbagai pihak sejak awal dalam proses perencanaan, potensi konflik dapat diminimalkan. Partisipasi masyarakat memungkinkan dialog terbuka sehingga masalah dapat diatasi sebelum memicu ketegangan.*

d. Transparansi dan Akuntabilitas: *Proses partisipasi mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam pengambilan keputusan. Dengan membuka akses informasi kepada masyarakat, pemerintah dapat lebih akuntabel terhadap keputusan yang diambil.*

4. **Hambatan dalam Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat**

Meskipun memiliki banyak keuntungan, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

a. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Politik: *Banyak masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan publik. Minimnya pendidikan politik dan kurangnya informasi membuat partisipasi masyarakat sering kali rendah.*

b. Keterbatasan Akses Informasi: *Informasi merupakan kunci dalam proses partisipasi yang efektif. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, akses terhadap informasi sering kali terbatas. Kurangnya transparansi pemerintah juga dapat menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.*

c. **Kesenjangan Kekuasaan:** *Dalam banyak kasus, partisipasi masyarakat hanya menjadi formalitas. Keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah atau elite politik, sehingga suara masyarakat sering kali tidak memiliki pengaruh yang signifikan.*

d. **Ketidakpercayaan Terhadap Pemerintah:** *Salah satu hambatan besar dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang tidak percaya pada niat baik pemerintah cenderung enggan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.*

5. **Studi Kasus: Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia**

Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik di Indonesia adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum di mana pemerintah daerah dan masyarakat bertemu untuk membahas prioritas pembangunan. Meskipun Musrenbang merupakan contoh positif dari partisipasi masyarakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti rendahnya representasi kelompok marjinal dan dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kualitas kebijakan, legitimasi keputusan, serta mengurangi potensi konflik. Namun, berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran politik, keterbatasan akses informasi, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat yang efektif.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi partisipasi masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan akses informasi, memperkuat pendidikan politik, dan menciptakan mekanisme partisipasi yang inklusif dan adil. Hanya dengan cara ini, kebijakan publik yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2007). *Tinjauan Tata Laksana Administrasi dan Pelayanannya Terhadap Masyarakat pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Lubis, Y. A., Bara, B., & Masitho, B. (2020). *Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengurusan KTP Elektronik di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Lubis, M. S. (2001). *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi dalam Rangka Aktivitas Kerja pada Badan Pengawasan Daerah Sumatera Utara*.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*.
- Tarigan, U. (2010). *Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Binjai (Studi pada SMPN 6 dan SMPN 7)*.
- Nasution, I., & Hasibuan, A. (2012). *Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai*.
- Lubis, M. R., & Supriyantini, S. (2009). *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Interpersonal dengan Komitmen Terhadap Organisasi pada Pengurus Wilayah Partai Matahari Bangsa Sumatera Utara*.
- Nasution, I. (2013). *Pengaruh Ilmu dan Teknologi dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (1994). *Komunikasi Tatap Muka dan Partisipasi Pembangunan (Suatu Study Deskriptif Analisis Tentang Peranan Komunikasi Tatap Muka Aparat Pemerintahan Kelurahan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dibidang Kebersihan lingkungan di Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kotamadya Dati II Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sinaga, A. S. (2019). *Peranan Motivasi Kerja dalam Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, A. A. (2018). *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Akta Jual Beli Tanah yang Dilakukan Notaris*.
- Nasution, T., & Lubis, A. A. (2012). *Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Angelia, N. (2014). *Analisis Status Perempuan dan Kematian Ibu. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 2(1), 31-39*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Barus, R. K. I., & Auza, A. (2023). *Studi Deskriptif Pendekatan Komunikasi Persuasif Antara Barista Dan Pelanggan Kedai Sasada Kopi Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Lubis, M. S. (2022). *Analisis Kinerja Pegawai pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Sitorus, N. E., & Jamil, B. (2016). *Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru SMK Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan*.
- Siregar, N. S. S., & Auza, A. (2023). *Strategi Komunikasi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Deskriptif Pada Warung Nasi Goreng Kak Mida Jalan Gatot Subroto Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S., & Ritonga, S. (2004). *Launching Sebagai Sarana Produk Peningkatan Penjualan Kartu Beken (Suatu Studi Korelasional Terhadap Pengaruh Launching Sebagai Promosi Dalam Peningkatan Penjualan Kartu Beken di PT. Telkom Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Syahradi, S., & Nasution, I. (2013). *Sistem Administrasi Pelayanan E-KTP di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1(1), 16-20*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2016). *Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Muda, I., & Batubara, B. M. (2023). *Strategi Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, M. S. (2008). *Teori Politik*.
- Hasibuan, M. A., & Nasution, I. (2016). *Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Pulau Semikat Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nasution, I., & Lubis, A. A. (2012). *PERANAN LURAH SELAKU PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN BINJAI ESTATE KECAMA TAN BINJAI SELATAN*.
- Hidayat, T. W. (2007). *Koperasi Indoensia (Potret dan Tantangan)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ritonga, S. (2006). *Efektivitas Komunikasi Terhadap Pelaksanaan Imunisasi dan Perkembangan Anak di Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung*.
- Harahap, Y., & Nasution, I. (2001). *Pelaksanaan Pembinaan Pegawai dalam Meningkatkan Disiplin Kerja di Kantor Camat Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*.
- Ritonga, S., & Dewi, R. (2014). *Proses Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang*.